

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar dalam pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya sinergitas potensi agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar, telah dipaparkan dan di analisis serta menghasilkan temuan-temuan penelitian, maka kegiatan selanjutnya adalah mengkaji hakikat dan makna dari temuan penelitian, masing-masing temuan penelitian akan dibahas dengan mengacu teori dan pendapat para ahli yang kompeten agar benar-benar dapat menjadikan setiap temuan kokoh dan layak untuk dibahas.

Dalam bab ini akan disajikan beberapa uraian pembahasan yang sesuai dengan hasil penelitian, sehingga pada uraian pembahasan ini peneliti akan menjelaskan hasil penelitian dengan teori yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya. Data-data diperoleh dari pengamatan wawancara mendalam serta dokumentasi sebagai mana telah peneliti mendeskripsikan pada analisis data kualitatif yang kemudian diidentifikasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Pengamatan wawancara yang telah dilaksanakan yaitu mengumpulkan data mengenai peran DPMD dalam pembangunan kawasan perdesaan sebagai upaya sinergitas potensi agrominawisata.

A. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar mempunyai peran penting dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar yaitu sebagai pemecah masalah dan sebagai fasilitator. Sesuai dengan perannya sebagai pemecah masalah, permasalahan yang pernah terjadi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata yaitu permasalahan payung hukum, pendanaan, dan kelembagaan. Sebagai pemberdaya masyarakat dan desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar mempunyai peran membantu kecamatan, pemerintah desa beserta kelembagaannya, serta masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang ada.

Beberapa permasalahan muncul dan dialami oleh desa yaitu diantaranya adalah payung hukum yang dimana menjadi landasan melaksanakan kegiatan sehingga kedepannya tidak menjadikan permasalahan terutama dalam hal penggunaan anggaran dari APBDes. Dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar melakukan pendampingan dalam pembuatan Perdes (Peraturan Desa) untuk mengatasi permasalahan payung hukum serta mengusahakan adanya dokumen RPKP sebagai rancangan pembangunan kawasan perdesaan Agrominawisata yang telah diperkuat dengan adanya Peraturan Bupati Blitar. Dari sisi pendanaan, desa juga mengalami kendala karena dalam RPJMDes yang merupakan

rencana pembangunan desa skala enam (6) tahunan memang belum direncanakan karena Kawasan Perdesaan ini merupakan sebuah hal yang baru sehingga belum masuk kedalam perencanaan desa. dalam hal ini DPMD melalui program dan kegiatannya yang telah diberikan anggaran untuk memfasilitasi pembangunan kawasan perdesaan sehingga kawasan agrominawisata dapat berjalan dengan anggaran yang ada. Di samping itu DPMD juga melakukan pembinaan dalam penggunaan APBDes dengan penyertaan modal dari APBDes (Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa) masing-masing desa yang tergabung Kawasan Perdesaan Agrominawisata yaitu sebesar minimal Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sebagai bentuk partisipasi desa dalam bentuk anggaran dalam pembangunan kawasan perdesaan agrominawisata. Dalam mengatasi permasalahan kelembagaan, dilakukan dengan membentuk kelembagaan BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan BUMDESMA (Badan Usaha Milik Desa Bersama) yang dinamakan dengan BUMDESMA Bumi Penataran yang diketuai oleh Bapak Syaiful Mujab dari Desa Kemloko.

Sementara itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar juga berperan sebagai fasilitator. Dalam hal ini memfasilitasi Pemerintah Desa dan Masyarakat desa dalam mengembangkan Kawasan Perdesaan Agrominawisata melalui pembinaan dan pendampingan dalam mengatasi sebuah masalah yang terjadi serta memfasilitasi kerjasama dengan instansi terkait.

Sesuai dengan buku yang ditulis oleh Sumaryo dan Kordiyana yaitu peran Agen Pembaharu antara lain: sebagai pemecah masalah, sebagai fasilitator, sebagai penghubung antar sistem, sebagai motivator, dan sebagai komunikator.¹⁴⁷

Dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agominawisata ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar masih mampu mengaplikasikan dua peran yaitu sebagai pemecah masalah dan sebagai fasilitator.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Ali yang bertujuan melihat peran stakeholder dalam pengembangan kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum peran stakeholder dalam pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Nglegok sudah berjalan dengan baik akan tetapi tidak semua stakeholder yang terlibat dapat mengembangkan minapolitan. Untuk itu untuk meembangkan kawasan minapolitan diperlukan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi antar stakeholder supaya terjadi komunikasi dan kesatuan tujuan untuk mewujudkan kawasan minapolitan yang berdaya saing.¹⁴⁸

Hal ini hampir sama dan memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mustangin untuk mengetahui bentuk dari adanya aksi

¹⁴⁷Sumaryo Gitosaputro dan Kordiyana, *Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat :Konsep, Teori, dan Aplikasinya di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 50

¹⁴⁸Muhammad Ali Zuhri Mahfud, dkk, *Peran dan Koordinasi Stakeholder dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar*.Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang, (Malang:Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2015)

pemberdayaan masyarakat pada program desa wisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan mengoptimalkan program desa wisata untuk dijadikan komoditi pariwisata berbasis potensi lokal masyarakat.¹⁴⁹ perbedaannya adalah penelitian yang ditulis Mustangin dkk ini hanya lingkup kecil satu desa terhadap masyarakat, sedangkan penelitian yang saya lakukan meneliti lebih luas karena Kawasan Perdesaan Agrominapolitan terdiri dari beberapa desa dan fokus pada peran-peran para stake holder terutama Dinas PMD Kab. Blitar yang sebagai Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Blitar.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung yang bertujuan untuk memahami berlangsungnya proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata di Desa Wisata Penglipuran dan implikasinya terhadap ketahanan sosial budaya wilayah. Hasil penelitian diketahui bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Penglipuran berlangsung dalam tiga tahap yaitu tahap penyadaran, pengkapasitasan dan pemberian daya. Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.¹⁵⁰ Berbeda dengan penelitian yang saya lakukan yaitu penelitian yang saya lakukan tidak hanya mengandalkan sektor

¹⁴⁹Mustangin, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Di Desa Bumiaji*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Pendidikan Indonesia (Padjajaran: Departemen of Sociology, Faculty of Social and Political Science, Universitas Padjadjaran, 2017)

¹⁵⁰Anak Agung Istri Andriyani, dkk, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali)*, Jurnal Ketahanan Nasional, (Yogyakarta: The National Resilience Study Program Graduate School Universitas Gadjah Mada, 2017)

pariwisata saja, tetapi juga memunculkan potensi pertanian dan perikanan yang dikemas menjadi kedalam konsep desa wisata yang berbasis komunitas desa yang termasuk kedalam anggota Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar.

Dalam proses pembangunan kawasan Perdesaan agrominawisata juga terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambatnya yang dialami oleh DPMD, maka adapun faktor pendukungnya secara internal yaitu adanya sumberdaya aparatur yang secara spesifikasi berkompeten dalam pembangunan Kawasan Perdesaan, kemudian Dokumen Perencanaan yang sudah dimasukkan kedalam Renstra sehingga menjadikan pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata ini mempunyai pembangunan yang berkelanjutan, dan kemudian Dukungan kerjasama Tim di DPMD yang saling mendukung, Tim ini berasal dari internal DPMD yang terdiri dari kepala Bidang dan Kepala seksi yang mempunyai keterkaitan dalam pembangunan Kawasan Perdesaan Agrominawisata. Faktor pendukung secara eksternal dari DPMD yaitu antusias Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam meningkatkan potensi unggulan masing-masing desa, antusias ini sangat diperlukan karena agar terjadinya koordinasi dan tindakan yang saling mendukung satu sama lain. Banyaknya potensi lokal dari masing-masing klaster, hal ini menjadikan pendukung yang merupakan obyek yang menjadi bahasan bersama. Serta adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memudahkan dalam operasional maupun koordinasi. Adanya dukungan teknologi akan mempermudah dalam hal manajemen Kawasan Perdesaan Agrominawisata baik pemasaran maupun pengelolaannya.

Faktor penghambat internal yaitu meliputi RPKP (Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan) yang dihasilkan TKPKP belum masuk Renstra (Rencana Strategis) masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) para stakeholder, hal ini sangat diperlukan karena merupakan rangkaian dari kegiatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan. Kurangnya Koordinasi antar Stakeholder yang mengakibatkan terhambatnya proses pembangunan kawasan agrominawisata, kurangnya koordinasi inilah yang mengakibatkan kurang produktifnya kelembagaan dan antar stakeholder. Kurangnya Dana Khusus untuk Kawasan Perdesaan menjadi sebuah penghambat untuk pembangunan kawasan perdesaan yang baru dan belum bisa melakukan mengelola dengan baik.

Sedangkan faktor penghambat secara eksternal yaitu SDM dan sosialisasi kepada masyarakat yang masih kurang sehingga menghambat komunikasi serta koordinasi. Kemudian dari sisi perencanaan pemerintah desa belum memasukkan isu kawasan perdesaan ke dalam RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) maupun RKPDes (Rencana Kerja Perangkat Desa), hal ini menjadikan evaluasi dalam penyusunan RPJMDes selanjutnya. Kemudian sarana dan prasarana kurang memadai menjadi penghambat pembangunan kawasan perdesaan dan juga menjadi penghambat dalam pelayanan para pengunjung yang tentunya sarana dan prasarana menjadikan pertimbangan dalam mengunjungi sebuah tempat wisata.

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Hesty yang mana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang digunakan dan

faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa: Faktor pendorong dari strategi pemberdayaan masyarakat yaitu lokasi Desa Wanurejo yang dekat dengan kawasan wisata Candi Borobudur, kelompok pelaku seni yang masih aktif mempertahankan budaya tradisional, dan tingkat kesadaran masyarakat akan kemajuan pembangunan tinggi, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata mandiri di Desa Wisata Wanurejo yaitu mafia pariwisata semakin menjamur, munculnya sifat egosentris atau individualisme masyarakat, fasilitas pelaku wisata yang terbatas serta Borobudur masih menjadi rute perjalanan pariwisata Jogja.¹⁵¹

Dari penelitian yang dilakukan oleh Hesty Pratiwi ini memiliki kesamaan tujuan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu dengan adanya pemberdayaan kepada masyarakat dengan adanya desa wisata diharapkan mampu menjadi pilar perekonomian masyarakat sekitar.

Hal ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arini yang tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep strategi perencanaan dan pengembangan serta hal-hal yang menjadi kendala bagi pihak pengelola Agro Belimbing Desa Moyoketen Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung beserta solusinya. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa strategi perencanaan dan pengembangan

¹⁵¹Hesty Pratiwi, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata Mandiri di Desa Wanurejo Kecamatan Borobudur Kabupaten Magelang*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang, Tahun 2017.

kawasan agrowisata yang dilakukan pihak pengelola agrowisata belimbing adalah dengan menentukan visi dan misi, memperhatikan dari aspek-aspek perencanaan pariwisata, serta melakukan strategi pemasaran. Penelitian yang dilakukan oleh Arini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada kendala-kendala atau faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan kawasan wisata berbasis potensi alam yang mana merupakan wujud kepedulian terhadap lingkungan hidup dengan memanfaatkannya sebagai kawasan wisata yang selanjutnya bertujuan untuk menjadi pusat perekonomian dan meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.